

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Grand Teori

Grand theory yang mendasari penelitian ini merupakan bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory*. Menurut (Donaldson & Davis, 1991) *Stewardship* menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Teori *stewardship* juga merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya (Sanjaya et al., 2017). Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas *principals* dan manajemen. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya (Haliah, 2013).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, dan mampu pertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi seta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut

maka stewards (manajer dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas (Haliah, 2013).

Menurut (Rachmawati & Anik, 2020) dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan daerah, ada hubungan positif antara kualitas laporan keuangan daerah dengan dengan teori Stewardship. Pemerintah yang bertindak sebagai manajer mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Pemerintah dituntut memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. dengan demikian manajemen dilingkungan pemerintah lebih dominan bertindak sebagai *steward*.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 laporan keuangan daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan yaitu menyediakan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang berguna untuk pengguna laporan keuangan dalam merancang dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya.

Peran laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk mempublikasi laporan keuangan pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai hak untuk mendapat informasi laporan keuangan secara mudah dan terbuka.

Laporan keuangan daerah memiliki 7 (Tujuh) komponen, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan kegiatan operasional keuangan yang mencakup pendapatan, biaya, dan surplus/defisit disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan.

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2.1.3 Kekayaan Daerah

Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tingkat kemakmuran suatu daerah dapat tergambarkan dari kekayaan daerah tersebut. Kekayaan daerah menunjukkan bagaimana kinerja sebuah Pemerintah daerah, sehingga apabila Pemda mempunyai kekayaan yang tinggi akan berusaha untuk memberikan informasi yang lengkap terhadap masyarakat sebagai bentuk dari manajemen public yang baik. Kekayaan daerah dapat ditunjukkan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kekayaan daerah dapat dilihat dari tingginya PAD suatu daerah. Kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerah dengan baik akan ditunjukkan oleh PAD (Nosihana & Yaya, 2016).

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan yang diterima dari iuran wajib seorang dan badan kepada kepala daerah. Tingginya daya beli masyarakat menunjukkan tingginya pendapatan yang mereka miliki. Pembangunan yang seimbang antara pendapatan dan daya beli masyarakat, menyebabkan pendapatan pajak juga meningkat.

2. Retribusi daerah

Jenis – jenis pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah adalah :

- a. Pajak provinsi
- b. Pajak dari kabupaten
- c. Pemasukan daerah dan retribusi

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah / Badan Usaha Milik Daerah dan penjualan aset milik daerah.

4. Lain – lain PAD yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

2.1.4 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah). Belanja daerah merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam hal pemberian wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerahnya. Kewenangan daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan (Dicky, 2020).

Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Pengalokasian belanja daerah diprioritaskan kepada pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Pendanaan belanja daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja daerah wajib dialokasikan oleh daerah untuk pendanaan urusan pemerintah daerah yang besarnya sudah diatur dalam undang – undang.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah terdiri atas 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

2.1.5 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah orang Republik Indonesia yang 6 (enam) bulan atau lebih yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jumlah penduduk di Indonesia ditentukan melalui sensus penduduk yang selama ini dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) setiap sepuluh tahun. Jumlah penduduk yang semakin besar maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan untuk menyampaikan informasi secara merata, karena pemda yang berukuran besar memerlukan pengawasan dan kebutuhan pelaporan yang lebih besar serta menanggung biaya pengawasan dan biaya pelaporan yang lebih tinggi.

2.1.6 Opini Audit

Hasil kinerja pemerintah juga tertuang di dalam laporan keuangannya, setiap akhir periode akuntansi pemerintah diwajibkan menyerahkan laporan keuangan kepada auditor independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK akan melakukan pemeriksaan pada laporan keuangan dengan tujuan mendapatkan opini audit. Opini audit ini merupakan pendapat yang diutarakan oleh auditor tentang kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dalam laporan keuangan terdapat 5 (lima) opini audit, yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan data secara real dan wajar. Penyusunan opini audit ini harus dipastikan bahwa laporan keuangan lengkap, tiga standar umum telah dipenuhi, bukti yang cukup telah diakumulasi, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), dan tidak ada celah untuk laporan harus dimodifikasi.

2. Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan

Pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan tertentu dapat terjadi apabila:

- a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lain.
- b. Karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari SAK.
- c. Laporan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit.
- d. Terdapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- e. Diantara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material dalam penerapan prinsip akuntansi.

- f. Data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh BAPEPAM namun tidak disajikan.

3. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Ditemukan adanya bukti yang cukup, sehingga auditor menyimpulkan adanya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Atau tidak ditemukannya bukti yang cukup, namun auditor menyimpulkan adanya kesalahan yang tidak terdeteksi pada penyajian laporan keuangan.

4. Tidak Wajar (TW)

Opini auditor dinyatakan tidak wajar jika pada saat auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan mendapati adanya kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas.

5. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

Ruang lingkup audit yang terbatas menyebabkan seorang auditor tidak akan melakukan pemeriksaan berdasarkan standar audit yang sudah ditetapkan maka auditor tidak akan melakukan penyimpulan terhadap pengaruh penyajian kesalahan material yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan.

2.1.7 Publikasi Laporan Keuangan di Internet

Publikasi Laporan Keuangan di internet merupakan bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan anggaran melalui internet. Pemerintah daerah melakukan Publikasi Laporan Keuangan di internet akan mempermudah pengguna informasi keuangan untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah (Verawaty, 2015). Menurut Alhajjriana et al., (2018) Dengan Publikasi Laporan Keuangan di internet akan mendapatkan beberapa manfaat, yaitu :

- a. Mudah di akses untuk seluruh pengguna informasi keuangan
- b. Meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya
- c. Meningkatkan interaksi dengan pengguna informasi keuangan

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait Publikasi Laporan Keuangan Pemerintrah Daerah di internet sudah banyak dilakukan. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintrah Daerah di internet yaitu

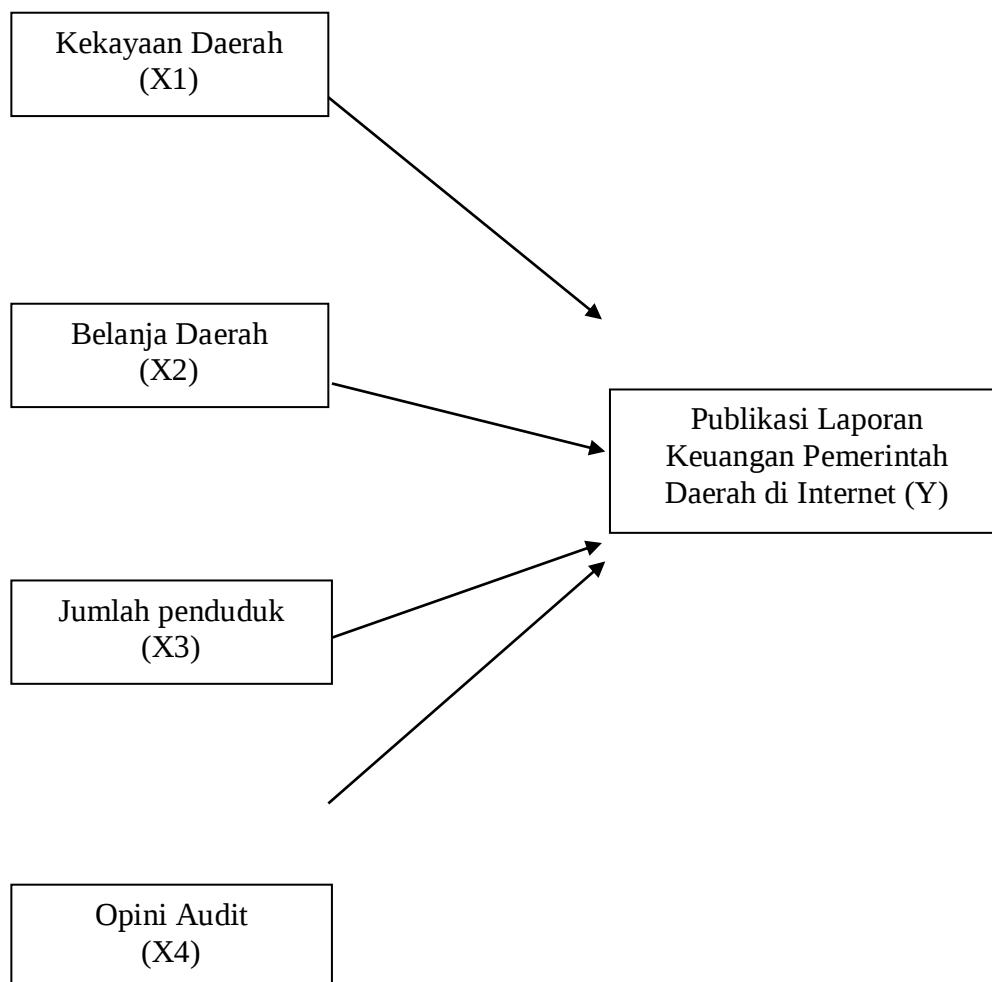
Table 2.1
Data Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kontribusi
1.	(Alhajjriana et al., 2018)	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi <i>Internet Financial Reporting</i> Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Belanja Daerah berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting pemda. Sedangkan Pendapatan daerah, Jumlah anggota DPRD dan Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting Pemda. Dan Internet Financial Reporting Pemda tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.	Referensi penelitian berikutnya.
2.	(Nosihana & Yaya, 2016)	Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia.	Kompetisi politik dan Ukuran pemda berpengaruh positif terhadap Internet Financial Reporting melalui e-overnment. Sedangkan, rasio pembiayaan utang (<i>Leverage</i>), kekayaan pemda, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting melalui e-Government.	Referensi penelitian berikutnya.
3	Saraswati et al., 2019)	Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet dan Faktor yang Mempengaruhinya	Belanja daerah dan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di internet.	Referensi penelitian berikutnya.

			Sedangkan opini audit dan Keberadaan Situs LPSE tidak berpengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di internet.	
4	Hesti, Devi Ainiyatul (2023)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah Melalui Media Internet Periode 2021.	Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa opini audit mempunyai dampak negatif signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan ukuran pemerintah daerah mempunyai dampak positif dan signifikan. Berdampak signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah periode tahun 2021 dipublikasikan di Internet.	Referensi penelitian berikutnya.
4	Eva Anggra Yunita (2021)	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Publikasi Informasi Keuangan Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Se-Jawa Tengah	Terjadi trend kenaikan hasil opini audit serta publikasi LKPD di website pemerintah daerah. Seluruh variabel tidak mempengaruhi publikasi LKPD di website pemerintah daerah. Peta politik tidak menjadi penghambat kepala daerah dalam menegakkan transparansi pelaporan keuangan	Referensi penelitian berikutnya.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan penjelasan dan tabel penelitian terdahulu, terdapat 4 variabel yang digunakan dalam penelitian ini. variabel Publikasi Laporan Keuangan di internet yang digunakan sebagai variabel dependen (Y) dan variabel kekayaan daerah, belanja daerah, jumlah penduduk, dan opini audit yang digunakan sebagai variabel independen (X). Sehingga, model penelitian akan digambarkan dalam bentuk berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Bangunan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan model penelitian yang telah diuraikan, hipotesis yang dirumuskan dan dikembangkan dalam penelitian ini antara lain :

2.4.1 Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Publikasi Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah di Internet Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana masyarakat. Dalam hal ini, kekayaan daerah dapat digunakan untuk mengukur apakah dapat mempengaruhi Publikasi Laporan Keuangan di internet. Kekayaan daerah dapat dilihat dari jumlah PAD suatu daerah. Pemda yang mempunyai kekayaan besar, akan menunjukkan kinerjanya yang baik atas pengelolaan sumberdaya dan potensi daerahnya. Semakin banyak pula informasi yang harus diungkapkan atas pertanggungjawaban kekayaan daerahnya yang besar. Melalui publikasi laporan keuangan di internet, pemda dapat menyampaikan laporan keuangan secara lebih lengkap dengan biaya yang lebih murah.

Pengaruh kekayaan daerah terhadap Publikasi Laporan Keuangan Daerah di internet juga telah didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Seperti hasil penelitian (Sofyani & Dwirama, 2020) menyebutkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Penelitian yang dilakukan oleh (Trisnawati & Achmad, 2014) menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap Publikasi Laporan Keuangan Daerah di internet. Semakin besar kekayaan daerah maka semakin besar kemungkinan Publikasi Laporan Keuangan Pemda di internet. Semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk mendorong melakukan publikasi laporan keuangan. Pemerintah daerah dengan kekayaan yang besar akan berupaya untuk mempublikasi laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hasil penelitian Mariasari (2023) menunjukkan variabel kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel pendapatan per kapita tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : kekayaan daerah berpengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di internet.

2.4.2 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Publikasi Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah di Internet Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1). Tujuan dari belanja daerah adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan memberikan fasilitas yang layak kepada publik. Di dalam penelitian ini belanja daerah diukur dengan realisasi belanja daerah. Penelitian Ramdhani, (2016) menyatakan bahwa tingginya belanja daerah oleh pemerintah daerah setempat dan secara keseluruhan belanja daerah tersebut belum digunakan untuk pelayanan umum kepada masyarakat, menyebabkan rendahnya keinginan pemda untuk mempublikasikan laporan keuangannya di internet. Rozi, (2018) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap Publikasi Laporan Keuangan Daerah di internet. Penelitian Putri & Setiawan (2022) menunjukan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh negatif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet.

Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi belanja daerah maka keinginan pemda untuk publikasi laporan keuangan semakin rendah. Kemungkinan tersebut terjadi karena, terkait dengan besaran belanja yang dilakukan pemerintah , akan tetapi dirasa tidak sepadan dengan manfaat/layanan yang sudah diterima masyarakat. Hal ini terutama terjadi jika terdapat belanja seperti aset yang tidak bisa

dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah yang tinggi, akan tetapi fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat masih rendah juga membuat keinginan pemda untuk publikasi rendah. Pelayanan yang terkait dengan pengeluaran tersebut antara lain, pelayanan dasar di bidang pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Rendahnya fasilitas dan pelayanan masyarakat terjadi karena proporsi belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemda lebih digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti belanja pegawai daripada digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang produktif seperti belanja modal.

Hasil penelitian Saraswati (2019) menunjukkan bahwa pengeluaran daerah mempengaruhi publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 : Belanja daerah berpengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di internet.

2.5.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet

Jumlah penduduk merupakan proksi kompleksitas pemda, di mana semakin tinggi populasi atau semakin kompleks sebuah pemda, maka semakin tinggi pula pengungkapan yang semestinya disampaikan pada laporan keuangan. Penelitian dari Utami & Sulardi (2019) menyebutkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan di internet. Penelitian Pratama et al., (2015) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet.

Jumlah penduduk yang besar juga dapat mendorong pemda untuk melakukan pengungkapan penuh (full disclosure) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Tingginya asimetri informasi cenderung terjadi pada organisasi

dengan populasi yang tinggi. Hal ini berlaku juga disuatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggi. Adanya kemajuan teknologi saat ini diharapkan informasi dapat disampaikan secara merata kepada seluruh penduduk. Publikasi laporan keuangan di internet merupakan salah satu solusi untuk menyampaikan informasi keuangan tidak membutuhkan biaya yang tinggi namun dapat menjangkau masyarakat secara luas dan mudah untuk digunakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hasil penelitian Dewi dan Adi (2019) menunjukkan jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan variabel tingkat pendidikan dan opini audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

H3 : Jumlah penduduk berpengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di internet.

2.5.4 Pengaruh Opini Audit Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet

Opini audit merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini auditor dinilai sebagai refleksi dari kualitas laporan keuangan. Opini audit yang diberikan kepada pemerintah daerah akan mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan dan kinerja pemda. Penelitian dari Hardiningsih et al., (2021) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan di internet. Sejalan dengan penelitian dari (Sofyani & Dwirama, 2019) bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap Publikasi Laporan Keuangan Daerah di internet.

Pemda yang mendapatkan hasil opini audit WTP biasanya akan lebih cenderung untuk publikasi laporannya, karena opini WTP diberikan kepada pemda yang laporan keuangannya baik dan bebas dari salah saji material. Sehingga pemda akan mempublikasikan laporan keuangan sebagai bukti kepada masyarakat

bahwa pengelolaan keuangan pemda berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan laporan keuangan pemda yang telah di audit dan mendapatkan predikat selain WTP, akan membuat pemerintah daerah tidak mempublikasikan laporannya di website pemerintah daerah, karena akan membuat masyarakat berpikir bahwa pengelolaan keuangan tidak berjalan baik.

Hasil penelitian Saraswati (2019) menunjukkan bahwa opini audit dan keberadaan situs web LPSE berpengaruh pada publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4 : Opini audit berpengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di internet